

**KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
MEMBANGUN KECERDASAN BERDEMOKRASI WARGA NEGARA¹**

Oleh:

Rini Rohmawati, Triyanto dan Moh. Muchtarom²

Alamat E-mail : rini.rohmawati@student.uns.ac.id

ABSTRACT

The objectives of research were: 1) to describe the pedagogic competency of civic education's teacher in building democratic intelligence among the 8th Graders of SMP Negeri 1 Kebakkramat, 2) to explain the factors supporting and inhibiting the Civic Education teacher in building democratic intelligence, and 3) to find out the effect of Civic Education teacher's pedagogic competency in building democratic intelligence of the 8th Graders of SMP Negeri 1 Kebakkramat. This research employed a qualitative research. Considering the result of research, the following conclusions could be drawn. 1) Civic Education teacher's pedagogic competency in building democratic intelligence was implemented through teaching-learning activity inside and outside classroom. Teacher's pedagogic competency included understanding on students, designing the learning, implementing the learning, evaluating the learning and developing the students' potency. 2) The factors supporting Civic Education teacher's pedagogic competency included school mission, learning time allocation, activity implemented by school, complete learning facility, teacher's pedagogic competency, and student ability. Meanwhile, the inhibiting factors included: a) internal factors: students were still crowded in learning time and teacher sometimes focused only on transfer of knowledge, b) external factor: family environment and peer's effect. 4) The effect of Civic Education teacher's competency included: a) tolerance, respect and appreciating diversity, b) questioning and expressing opinion bravely, c) maintaining togetherness, and d) participating actively.

Keywords: *teacher's pedagogic competency, civic education, democratic intelligence.*

¹ Artikel Penelitian

² Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa, "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (pasal 1 butir 1). Lebih lanjut dikemukakan bahwa:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. (pasal 3)

Kedua bunyi pasal di atas sesuai dengan salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian, perlu ditekankan bahwa aspek kecerdasan itu

seyogyanya dipandang sebagai suatu keutuhan. Hal itu tercermin dari konsep kecerdasan pada saat ini, dimana kecerdasan tidak semata-mata berkenaan dengan aspek nalar atau intelektual atau kognitif tetapi melingkupi segala potensi individu. Sebagaimana kini kita kenal dalam konsepsi kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan kinestetik

Adapun prinsip pendidikan nasional diantaranya adalah pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dan pendidikan diselenggarakan dengan memerikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Untuk mencapai tujuan dan prinsip pendidikan nasional di atas maka dibutuhkan tenaga pendidik salah satunya yakni guru. Berdasarkan pasal 1 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berbunyi "Guru adalah pendidik profesional yang mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi seorang guru sangat menentukan mutu pendidikan.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Dalam kompetensi pedagogik guru, seorang guru dituntut untuk mempunyai kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik guru dalam hal ini kemampuan dalam mengelola kelas, dapat terlihat dari cara guru mengajar dengan melakukan variasi dalam setiap kegiatan belajar, ketrampilan yang berhubungan dengan upaya untuk menciptakan dan mengendalikan kelas. Lebih lanjut kreatifitas guru dalam pengelolaan kelas dan menciptakan suasana yang kondusif serta demokratis sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal.

Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan tiga kompetensi yang harus dimiliki peserta didik, yakni: *civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), *civic value/disposition* (nilai/karakter kewarganegaraan) dan *civic skill* (ketrampilan kewarganegaraan). Pembagian tersebut Menurut Winarno

dan Wijianto (2010: 50) menjelaskan bahwa, “pembagian atas ketiga domain ini jika dikaitkan dengan model Benjamin S Bloom maka akan tampak kesejajarannya dengan tiga ranah; kognitif, afektif dan psikomotor”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, “pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) bisa disejajarkan dengan domain atau ranah kognitif, ketrampilan/kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) sejajar dengan domain atau ranah psikomotor, sedangkan sikap/watak kewarganegaraan (*civic disposition*) sejajar dengan domain atau ranah efektif”.

Tujuan dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1)berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan;
- 2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi;
- 3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya;
- 4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi. (Winarno, 2013: 18-19)

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi esensinya adalah untuk meningkatkan kemampuan partisipasi warga negara dalam memelihara dan mengembangkan sistem politik demokrasi Pancasila. Kehidupan demokrasi akan tumbuh kuat tidak hanya oleh bentuk pemerintah yang demokratis, tetapi juga didukung oleh kehidupan demokratis warga negara. Kehidupan demokratis ini dilakukan melalui pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam diri warga negara. Membentuk masyarakat demokratis perlu direncanakan, artinya masyarakat yang demokratis tidak terjadi dengan sendirinya melainkan perlu dipersiapkan karena demokrasi merupakan watak yang dapat terbentuk melalui proses.

Proses pendidikan dan pembiasaan yang ideal dilakukan di sekolah, melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan demokrasi yang dilaksanakan di persekolahan bertujuan untuk membangun kecerdasan berdemokrasi bagi peserta didik dan dilaksanakan dalam kelas Pendidikan Kewarganegaraan dalam nuansa sebagai laboratorium demokrasi. Seperti "tujuan Pendidikan

Kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara". (Hidayat & Azra, 2010: 3)

Ada 3 (tiga) Peran Pendidikan Kewarganegaraan diungkapkan oleh Budimansyah (2010: 144-145) yang mengemukakan bahwa, *Pertama* Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler di lembaga pendidikan formal (sekolah/ perguruan tinggi) maupun non formal (luar sekolah) yang berperan sebagai wahana pemuliaan dan pemberdayaan anak pemuda sesuai dengan potensinya agar menjadi warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). *Kedua*, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai gerakan sosio kultural kewarganegaraan yang berperan sebagai wahana aktualisasi diri warga negara baik secara perorangan maupun kelompok sesuai hak, kewajiban, dan konteks sosial budayanya, melalui partisipasi aktif secara cerdas dan bertanggungjawab. *Ketiga*, PKn sebagai program pendidikan politik kebangsaan bagi para penyelenggara negara, anggota dan pimpinan organisasi sosial dan organisasi politik yang dikemas dalam sebagai bentuk pembinaan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan kebajikan kewarganegaraan (*civic*

disposition) yang mengacu pada prinsip konseptual pedagogis untuk mengembangkan daya nalar bukan sebagai wahana indoktrinasi politik dan sebagai suatu proses pencerdasan.

Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis untuk mencerdaskan kehidupan warga negara dalam berdemokrasi. Melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas, warga negara muda diajak untuk mempelajari, mengkaji dan menilai dan sekaligus dilatih memecahkan berbagai persoalan yang ada di masyarakat sekitarnya. Guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai manajer kelas (pengelola kelas), mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam membangun kecerdasan berdemokrasi dan sekaligus menanamkan nilai-nilai demokrasi di kelas maupun di lingkungan sekolah.

Dengan demikian dimana sebelumnya Pendidikan Kewarganegaraan lebih ditekankan sebagai pendidikan indoktrinasi, dan dengan paradigma baru bergeser menjadi bidang kajian ilmiah pada program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi. Sebagai bidang kajian ilmiah materi-materi Pendidikan Kewarganegaraan di persekolahan dapat diperdebatkan dan

dikembangkan sekaligus dikembangkan sesuai dengan perkembangan nalar dan kebutuhan peserta didik. Guru Pendidikan Kewarganegaraan diberi keleluasan untuk mengembangkan daya nalar dan kreativitasnya dalam mengembangkan materi Pendidikan Kewarganegaraan kepada peserta didik. Begitu juga Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana utama dan esensi pendidikan demokrasi harus dimaknai bahwa proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan cara-cara konvensional harus ditinggalkan, seperti pemikiran bahwa belajar itu harus di dalam kelas, belajar harus guru yang aktif, dan belajar berpusat pada guru.

Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan ditujukan untuk membicarakan hakikat dan pemeliharaan terhadap ideologi demokrasi sebagai tanggung jawab yang sangat besar kepada guru. "Proses pembelajaran merupakan bagian dan kesatuan dari proses demokrasi. Mengajar demokrasi tanpa mempraktikannya di dalam kelas adalah hal yang sia-sia, Itu berarti bahwa kelas *civics* harus menjadi laboratorium demokrasi, yang mempelajari pertumbuhan dan mempraktikkan dasar-dasarnya" (Abdul Aziz Wahab dan Sapriya, 2011: 17)

Ketiga komponen Pendidikan Kewarganegaraan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), ketrampilan kewarganegaraan (*civic skill*) dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) berkaitan erat dengan sasaran pembentukan karakter pribadi warga negara. Warga negara yang memiliki pengetahuan akan menjadi warga negara yang cerdas, warga negara yang memiliki ketrampilan kewarganegaraan dan menjadi warga negara yang partisipatif dan bertanggungjawab. Kecerdasan demokrasi yang dimaksud peneliti berkaitan dengan *civic skills* (ketrampilan kewarganegaraan) dimana nantinya peserta didik mampu mempunyai ketrampilan diantaranya berani mengemukakan pendapat, berani bertanya dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran maupun di lingkungan sekolah.

Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan dan Misi Pendidikan demokrasi yang sesuai dengan Permendiknas No.22 tahun 2006 belum sepenuhnya tercapai. Pendidikan yang demokratis kurang diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah tercermin di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kebakkramat, hal ini diketahui setelah penulis melakukan observasi dan wawancara dengan siswa sekolah tersebut dan dari hasil observasi dan wawancara tersebut

penulis menyimpulkan bahwa proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Kebakkramat kurang demokratis. Hal ini ditunjukkan dengan pembelajaran yang kurang hidup, dimana peserta didik kurang aktif dan terkesan monoton dalam pembelajaran. Pembelajaran masih berpusat pada guru, nilai-nilai demokrasi yang seharusnya ada dalam pendidikan demokratis masih belum ditunjukkan oleh beberapa siswa. Padahal keberhasilan belajar siswa dilihat dari kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor.

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menuntut siswa juga harus memiliki kemampuan afektif dan psikomotorik yang sejalan dengan komponen Pendidikan Kewarganegaraan yaitu *civic skills* dan *civic disposition*. Nilai-nilai demokrasi seharusnya diimplementasikan tidak hanya di dalam kelas ketika proses pembelajaran, tetapi dalam kehidupan di lingkungan sekolah juga harus diimplementasikan. Di Sekolah dalam upaya membentuk kecerdasan demokrasi melalui kegiatan-kegiatan sekolah yang bernuansa demokrasi, seperti kampanye ketua OSIS sampai pada proses pemilu dan pemungutan suara. Kegiatan ini sebagai bentuk pembelajaran demokratis yang nyata dimana siswa dapat terlibat secara langsung. Menurut hasil pengamatan

ketika peneliti Praktik Pengalaman Lapangan di sekolah tersebut, ada beberapa siswa masih cenderung pasif mengikuti kegiatan tersebut, terlihat dengan respon siswa yang kurang antusias. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peserta didik di sekolah tersebut masih kurang dalam komponen *civic skills*, ketrampilan mereka dalam mengemukakan pendapat, berpartisipasi masih kurang.

Dengan adanya tuntutan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik (kemampuan dalam mengelola kelas) dan dengan tuntutan sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, maka seharusnya guru Pendidikan Kewarganegaraan mengelola pembelajaran yang dapat menumbuhkan kecerdasan berdemokrasi siswa di kelas dalam hal ini ketrampilan siswa untuk berani bertanya, berpendapat, berargumentasi, toleransi, belajar menghargai dan menghormati pendapat orang lain, tanggung jawab, jujur, kesamaan hak dan kewajiban, tumbuhnya semangat persaudaraan dan akan berdampak pada perilaku siswa di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas maka masalah yang dirumuskan adalah “Bagaimana kompetensi pedagogik guru PKn dalam membangun kecerdasan berdemokrasi?, Apa saja

faktor pendukung dan penghambat guru PKn? dan Apa dampak perilaku peserta didik yang memiliki kecerdasan berdemokrasi?”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya guru PKn dalam membangun kecerdasan berdemokrasi, faktor pendukung dan penghambat serta dampak perilaku dari kecerdasan berdemokrasi yang dimiliki peserta didik kelas VIII SMP Negeri 1 Kebakkramat tahun 2016.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memilih lokasi di SMP Negeri 1 Kebakkramat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti dalam hal ini berusaha untuk menggambarkan keterangan, konsep dan tanggapan atau respon yang berhubungan dengan obyek. Peneliti menyajikan data data berupa keterangan atau tanggapan dari informan dengan memahami makna baru, observasi lapangan serta studi dokumen yang berhubungan dengan obyek, yaitu mengenai Kompetensi pedagogik guru PKn dalam membangun kecerdasan berdemokrasi kelas VIII (delapan) di SMP Negeri 1 Kebakkramat. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menyajikan data deskriptif berupa keterangan atau tanggapan dari informan, observasi lapangan serta studi dokumen yang

berupa fakta yang berkaitan dengan Kompetensi pedagogik guru PKn dalam membangun kecerdasan berdemokrasi kelas VIII (delapan) di SMP Negeri 1 Kebakkramat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, antara lain: wawancara, analisis dokumen, observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan maupun gambar yang diperoleh melalui pemotretan saat penelitian berlangsung. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan dokumen. Data primer merupakan data utama yang diperlukan dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara yang bersumber dari informan. antara lain: wakil kepala sekolah bagian kurikulum, guru PPKn, dan peserta didik SMP Negeri 1 Kebakkramat. Selanjutnya, data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari literatur-literatur, peraturan perundangan, dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti antara lain: dokumen yang memuat data profil sekolah SMP Negeri 1 Kebakkramat, Silabus, Program semester dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Teknik sampling dalam penelitian ini bersifat *purposive sampling*, dimana peneliti cenderung memilih informan

yang lebih tahu. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh dan menyusun data penelitian adalah dengan wawancara, observasi serta analisis dokumen. Guna memperoleh data yang benar-benar valid, maka pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data dan triangulasi metode untuk menutup kemungkinan apabila ada kekurangan data dari salah satu sumber. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model deskriptif analisis dengan tahap-tahap sebagai berikut: (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Sajian Data, (4) Pengambilan kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Memilih Topik Kajian, instrumentasi, pelaksanaan penelitian, dan pengolahan data hasil penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kompetensi pedagogik terdiri atas lima sub kompetensi seperti yang dikemukakan Sudarwan Danin (2010: 22) sebagai berikut:

kompetensi pedagogik terdiri atas lima sub kompetensi, yaitu: memahami peserta didik secara mendalam; merancang pembelajaran; termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran; melaksanakan pembelajaran; merancang dan melaksanakan evaluasi

pembelajaran; dan mengembangkan peserta didik untuk megaktualisasikan berbagai potensinya

Pendidikan demokrasi yang dilaksanakan di persekolahan bertujuan untuk membangun kecerdasan berdemokrasi bagi peserta didik dan dilaksanakan dalam kelas Pendidikan Kewarganegaraan dalam nuansa sebagai laboratorium demokrasi. Seperti “tujuan Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah menjadikan warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara”. (Komaruddin dan Azyumardi, 2010: 3). Selanjutnya berdasarkan penelitian di peroleh hasil sebagai berikut:

1. Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Kecerdasan Berdemokrasi pada Peserta Didik Kelas VIII di SMP Negeri 1 Kebakkramat

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan analisis dokumen yang telah dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa guru Pendidikan Kewarganegaraan telah melaksanakan beberapa komponen dalam kompetensi pedagogik dalam membangun kecerdasan berdemokrasi guru yaitu meliputi

a. Guru dalam Memahami Karakteristik Peserta Didik dilakukan dengan

memahami kognitif dan kepribadian peserta didik untuk mengidentifikasi bekal bahan ajar awal belum dilakukan.

b. Guru dalam Merancang Pembelajaran, dengan memasukkan materi dan nilai-nilai demokrasi dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), dan memuat hal-hal berikut: Membuat tujuan instruksional khusus; Menyiapkan materi yang relevan dengan tujuan, waktu, fasilitas, perkembangan ilmu, kebutuhan dan kemampuan siswa, komprehensif dan sistematis, dan fungsional efektif; merancang metode yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa, meliputi metode diskusi, tanya jawab dan ceramah variatif; Menyediakan sumber belajar, yakni: buku paket kurikulum KTSP, lembar kerja siswa dan internet; dan Menyiapkan media antara lain: power point, white board, gambar-gambar yang berhubungan dengan materi pembelajaran.

c. Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran, menggunakan beberapa metode pembelajaran seperti diskusi, tanya jawab, jig saw, ceramah variatif. Hal ini sesuai dengan rancangan yang disusun dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Perihal kompetensi pedagogik guru dalam komponen melaksanakan pembelajaran sebagai

upaya membangun kecerdasan berdemokrasi warga Negara dilakukan dengan metode diskusi saat proses pembelajaran berlangsung sebagai sarana interaksi antara peserta didik dengan guru dan peserta didik dengan peserta didik.

d. Guru dalam Merancang dan Melaksanakan Evaluasi Pembelajaran, dengan melakukan penilaian tiga aspek, baik pengetahuan, sikap maupun ketrampilan. Pengetahuan (kognitif) menggunakan tes tertulis dan tes lisan dengan instrumen soal pilihan ganda dan uraian, serta daftar pertanyaan. Penilaian sikap dan ketrampilan dilakukan dengan pengamatan saat pembelajaran berlangsung dengan indikator keaktifan, wawasan, kemampuan mengemukakan pendapat dan kerjasama.

e. Guru dalam Mengembangkan Peserta Didik untuk Mengaktualisasikan Berbagai Potensi Yang Dimilikinya, dengan cara membimbing dan mengarahkan peserta didik baik dalam proses pembelajaran seperti ketika kegiatan berdiskusi dan di luar pembelajaran untuk mengikuti kegiatan sekolah seperti OSIS, kampanye dan pemilihan ketua OSIS di sekolah.

Dari pemaparan di atas komponen kompetensi pedagogik guru dalam upaya membangun kecerdasan

berdemokrasi sudah dilaksanakan meskipun ada beberapa komponen yang belum optimal.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Upaya Membangun Kecerdasan Berdemokrasi pada Peserta Didik Kelas VIII (Delapan) di SMP Negeri 1 Kebakkramat

a. Faktor pendukung, meliputi:

- 1) Faktor misi sekolah, yang dapat dimaknai bahwa kompetensi guru sangat diperlukan khususnya dalam pengelolaan kelas yang berkualitas, dan menghasilkan lulusan yang cerdas baik kecerdasan intelektual, emosional, sosial maupun spiritual.
- 2) Faktor alokasi waktu pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang 3 (tiga) jam pelajaran dalam satu minggu dimaknai dapat memberikan kesempatan waktu bagi guru dalam membangun kecerdasan berdemokrasi pada peserta didik.
- 3) Faktor kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sekolah sebagai upaya membangun kecerdasan berdemokrasi. Seperti kampanye dan pemilihan ketua OSIS)
- 4) Faktor fasilitas pembelajaran yang lengkap seperti *white board*, LCD dan jaringan internet yang cukup di setiap kelas.

- 5) Faktor komponen kompetensi pedagogik guru Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri seperti pemahaman terhadap peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang dan melaksanakan evaluasi, dan mengembangkan potensi peserta didik.

Hal ini sesuai dengan pendapat Muhibbin Syah (2006: 144) yang menyatakan bahwa secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa, antara lain:

- 1) Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa), yakni keadaan atau kondisi siswa;
 - 2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan belajar di sekitar siswa;
 - 3) Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya belajar yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.
- b. Faktor penghambat, meliputi:
- 1) Faktor Internal, yakni: Pertama, masih ada peserta didik yang ramai sendiri ketika sedang mengikuti pembelajaran. Kedua, Materi pendidikan Kewarganegaraan yang banyak sehingga memaksa guru kadang mengabaikan *transfer value* dan fokus pada *transfer knowledge*.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Budimansyah (2010: 142-143) tentang pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang salah arah, yaitu:

- 1) Proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lebih menekankan pada dampak instruksional (instructional effects) yang terbatas pada penguasaan materi (contents mastery). atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitif saja.
- 2) Pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar pada siswa melalui perlibatan secara proaktif dan interaktif dalam proses belajar di kelas atau di luar kelas (intra dan ekstra kurikuler) sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (meaningful learning) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku siswa.
- 3) Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wahana sosio-pedagogis untuk mendapatkan "hands-on experiences" juga belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktek pembiasaan perilaku dan ketrampilan dalam kehidupan yang demokratis dan sadar hukum.

2) Faktor eksternal, meliputi faktor lingkungan, seperti keluarga disebabkan karena kurangnya komunikasi antara peserta didik dengan orang tua karena kesibukan orang tuanya sehingga pergaulan peserta didik kurang pengawasan. Selain itu lingkungan pergaulan juga berpengaruh. Apalagi usia peserta didik sekolah menengah pertama yang masih sering ikut-ikutan teman dan belum jelas maksud dari suatu tindakan. Faktor lingkungan peserta didik tersebut, apabila dikaitkan dengan teori sesuai dengan pemikiran Dorothy Low Nolte, yang mengatakan bahwa, "Anak akan tumbuh sebagaimana lingkungan yang mengajarnya dan lingkungan tersebut juga merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan yang dihadapinya setiap hari" (Hidayatullah, 2010: 55).

3. Dampak Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Upaya Membangun Kecerdasan Berdemokrasi pada Peserta Didik Kelas VIII di SMP Negeri 1 Kebakkramat

Dadang Sundawa (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, Kecerdasan demokrasi dibangun dari kelas yang dibiasakan dengan nilai-nilai demokrasi. Nilai demokrasi dikemukakan oleh Zamroni dalam

Winarno (2013: 111) yang menyebutkan antara lain:

- 1) Toleransi
- 2) Kebebasan mengemukakan pendapat
- 3) Menghormati perbedaan pendapat
- 4) memahami keanekaragaman dalam masyarakat terbuka dan demokratis
- 5) menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan
- 6) percaya diri
- 7) tidak menggantungkan pada orang lain
- 8) saling menghargai
- 9) mampu mengekang diri
- 10) kebersamaan, dan
- 11) keseimbangan

Dari pendapat di atas dapat dirumuskan bahwa seseorang memiliki kecerdasan demokrasi warga negara apabila menerapkan nilai-nilai demokrasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peserta didik sudah cukup memiliki kecerdasan berdemokrasi dan dapat menunjukkan dalam tingkah laku, yaitu: Toleransi, Berani bertanya dan mengemukakan pendapat, kebersamaan, Berpartisipasi aktif.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan peneliti di lapangan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa: (1)

Kompetensi pedagogik guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun kecerdasan berdemokrasi dilakukan melalui kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dan kegiatan di luar kelas. Kompetensi pedagogik guru meliputi pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran dan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. 2) Faktor pendukung kompetensi pedagogik guru Pendidikan Kewarganegaraan adalah faktor misi sekolah, faktor alokasi waktu pelajaran, faktor kegiatan yang diselenggarakan sekolah, faktor fasilitas pembelajaran yang lengkap, faktor kompetensi pedagogik guru, dan faktor kemampuan siswa. Sedangkan faktor penghambat yakni: a) faktor internal, seperti faktor siswa yang masih ramai sendiri ketika pembelajaran dan kadang guru hanya fokus pada transfer knowledge. b) faktor eksternal, seperti pengaruh lingkungan keluarga dan teman sebaya. 3) Dampak dari kompetensi guru Pendidikan Kewarganegaraan antara lain: a) saling toleransi, menghormati dan menghargai perbedaan, b) berani bertanya dan mengemukakan pendapat, c) menjaga kebersamaan dan d) berpartisipasi aktif. Adapun saran yang bisa diberikan terkait kesimpulan tersebut antara lain Sebaiknya guru meningkatkan kompetensi pedagogik

dalam komponen pelaksanaan pembelajaran demi terciptanya suasana kelas yang kondusif dan peserta didik fokus ketika pembelajaran berlangsung, Hendaknya semua pendidik berperan dalam membangun kecerdasan berdemokrasi dalam rangka membentuk warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*), Peserta didik sebaiknya menghormati guru ketika proses pembelajaran dengan tidak ramai sendiri ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, Peserta didik sebaiknya lebih aktif dalam mengikuti kegiatan yang diselenggarakan sekolah sehingga berdampak pada kecerdasan dalam berdemokrasi baik di dalam maupun di luar pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, Dasim. (2010). Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara.
- Hidayat K & Azra A. (2010). Pendidikan Kewargaan (Civic Education). Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Sudarwan Danin. (2010). Profesionalisasi dan etika profesi guru. Bandung: Alfabeta

- Syah, Muhibbin. (2006). Psikologi Belajar. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Wahab, A.A & Sapriya. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta
- Winarno & Wijianto. (2010). Ilmu Kewarganegaraan dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. Surakarta: UNS Press.
- Winarno. (2013). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara.